

**UPAYA - UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN
PENERIMAAN PPH BADAN PADA KPP MADYA PALEMBANG**



Skripsi Oleh:

**ALDI PRIMA
NIM: 01071603026**

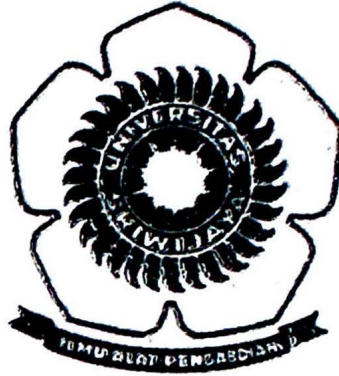
**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
2011**

R 21215
21677

336 . 240 07
Ald
u
ci/1 → 102502
2011

**UPAYA - UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN
PENERIMAAN PPH BADAN PADA KPP MADYA PALEMBANG**



Skripsi Oleh:

**ALDI PRIMA
NIM: 01071003026**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldi Prima

NIM : 01071003026

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

“Upaya – Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan PPH Badan Pada KPP Madya Palembang”.

Pembimbing

Ketua : Ermadiani, SE, M.M, Ak

Anggota : Ahmad Subeki, SE, M.M, Ak

Tanggal diuji : 1 November 2011

Adalah benar-benar hasil karya saya dibawah bimbingan tim pembimbing.

Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin secara keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Indralaya, 04 November 2011

Yang memberi pernyataan,


METERAI
TEMPEL
REPUBLIK INDONESIA
9DA2AAF496830482
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Aldi Prima

NIM. 01071003026

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : ALDI PRIMA
NIM : 01071003026
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : **Upaya – Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan
Penerimaan PPH Badan Pada KPP Madya Palembang**

Telah dilaksanakannya ujian komprehensif pada tanggal 1 November 2011 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 4 November 2011

Ketua

Anggota

Anggota



Ermadiani, SE, M.M, Ak

NIP. 196608201994022001



Ahmad Subeki, SE, M.M, Ak

NIP. 196508161995121001

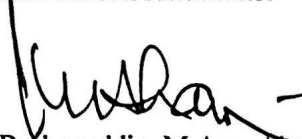


Drs. H. Harun Dalamat, M.Si, Ak

NIP. 195501131990031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak

NIP.195808281988101001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Jadilah manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.”

Persembahan:

- Allah SWT
- Kedua orang tuaku
- Kakakku
- Aznah Putri Sari
- Keluarga Besarku
- Sahabat-Sahabatku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini mengambil judul “Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan PPh Badan Pada KPP Madya Palembang”, yang merupakan salah satu syarat yang harus penulis penuhi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, Bab VI Analisis dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari KPP Madya Palembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2007-2010 upaya upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Palembang dalam meningkatkan penerimaan PPh Badan cukup efektif dan terlaksana dengan baik, pengaruh Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan terhadap jumlah penerimaan PPh Badan di KPP Madya Palembang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 tidak terlalu berpengaruh atau tidak significant bahkan dapat dikatakan sangat kecil. Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan penerimaan PPh badan terdapat beberapa hambatan yang ditemui

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan baik dalam penyusunan maupun penyajiannya. Selanjutnya penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja serta merasa dibebankan atau diberatkan selama proses penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Disamping itu pula, penulis mengharapkan adanya kritik serta saran yang bersifat membangun guna perbaikan selanjutnya.

Penulis,

Aldi Prima

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan PPh Badan Pada KPP Madya Palembang” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. H. Syamsurijal, A.K, Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas.
3. Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. M. Nasai, SE, MAFIS, Ak, Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ermadiani, SE, MM, Ak, Ketua Pembimbing Skripsi.
6. Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, Anggota Pembimbing Skripsi.
7. Drs. H. Harun Dalamat, M.Si, Ak, Anggota Penguji Ujian Komprehensif.
8. Semua Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Semua staf dan pegawai di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
10. Kepala dan staf KPP Madya Palembang yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kedua orang tuaku dan kedua kakakku yang telah memberikan nasihat, dukungan, doa, bantuan serta perhatian yang sangat besar.
12. Semua keluarga besarku, yang telah mendoakan saya dalam menyelesaikan perkuliahan, dan semua keluarga yang telah mendoakan dan mendukung kuliah saya selama ini.
13. Aznah Putri Sari, seseorang yang sabar, tulus dan yang memberikan dukungan serta perhatian yang sangat besar.
14. Sahabatku Ahok, Aldy, Zulfah, Dony, Putra, Oktar, Arix, Zytho, Kiko, Helpy, Bobby atas semua dukungannya.
15. Semua sahabat kampusku Zuardiansyah, Heru, Bryan, Ayu, Gusty, Betha, Aulia dan semua pihak yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman angkatan 2007, kakak-kakak tingkat dan adik-adik tingkat di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Semoga Allah SWT membalas budi baiknya dan memberikan berkah kepada kita semua. Amin.

Penulis,

Aldi Prima

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI / TIDAK PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAKSI.....	xiii
ABSTRACT	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian	9
1.5.2. Data dan Metode Pengumpulan data.....	9
1.5.3. Teknik Analisis Data.....	11
1.6. Sistematika Penulisan	11

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Dasar-dasar Perpajakan.....	14
2.1.1. Pengertian Pajak.....	14
2.1.2. Fungsi Pajak	16
2.1.3. Pembagian Jenis Pajak.....	18
2.1.4. Cara Pemungutan Pajak	19
2.1.5. Asas Pemungutan Pajak.....	20
2.1.6. Perlawanan Terhadap Pajak	21
2.2. Wajib Pajak.....	22
2.2.1. Kewajiban Wajib Pajak	23
2.2.2. Hak-Hak Wajib Pajak.....	24
2.3. Pajak Penghasilan	25
2.3.1. Subjek Pajak Badan dan Non Subjek Pajak Badan.....	26
2.4. Objek PPh Badan dan Non Objek PPh Badan	29
2.5. Beban Penghasilan kena Pajak.....	34
2.6. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Oleh Dirjen Pajak.....	39
2.6.1. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak	39
2.6.1.1. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi.....	40
2.6.2. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi	41
2.6.2.1. Sosialisasi SPT	41
2.6.2.2. Fungsi SPT	42
2.6.3. Penerbitan Surat Tagihan Pajak.....	44
2.6.3.1. Pengertian STP.....	44

2.6.3.2. Penyebab Terbitnya STP.....	44
2.6.4. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak	46
2.6.4.1. Pengertian Surat Ketetapan Pajak.....	46
2.6.4.2. Fungsi Surat Ketetapan Pajak.....	46
2.6.4.3. Jenis-Jenis Ketetapan Pajak	47
2.6.5. Self Assessment System	48
2.6.6. Pemeriksaan Pajak	49

BAB III GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PALEMBANG

3.1. Sejarah Singkat Organisasi.....	51
3.2. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Madya Palembang	54
3.3. Struktur Organisasi KPP Madya Palembang dan Pembagian Tugas.....	55
3.4. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang	69
3.5. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Oleh KPP Madya Palembang....	70
3.5.1. Sosialisasi SPT	70
3.5.2. Penerbitan Surat Tagihan Pajak.....	71
3.5.3. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak	72
3.5.4. Kunjungan Dalam Rangka Penggalian Potensi Pajak	73
3.5.5. Self Assessment.....	73
3.5.6. Pemeriksaan Pajak	74
3.5.7. Pemutakhiran Profile Wajib Pajak.....	75
3.5.8. Pemanfaatan Data Wajib Pajak	75

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Upaya Peningkatan Penerimaan PPH Badan Di KPP Madya Palembang Dari Tahun 2007 Sampai Dengan Tahun 2010.....	77
4.1.1. Penerbitan Surat Teguran Pajak.....	79
4.1.2. Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	81
4.1.3. Sosialisasi SPT Dan Undang-Undang Pajak Yang Dilakukan KPP Madya Palembang Tahun 2007 Sampai Dengan Tahun 2010.....	85
4.1.4. Penggalian Potensi Pajak Melalui Account Representative	87
4.1.5. Pemeriksaan Pajak	90
4.2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Penerimaan PPh Badan Pada KPP Madya Palembang.....	93
4.3. Solusi Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Hambatan Pelaksanaan Peningkatan Penerimaan PPh Badan Pada KPP Madya Palembang	94

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	96
5.2. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA.....	99
---------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Jumlah Penerimaan PPH Badan KPP Madya Palembang Tahun 2007 Sampai Dengan Tahun 2010	77
Tabel 4.2. Jumlah Wajib Pajak Badan KPP Madya Palembang Tahun 2007 Sampai Dengan Tahun 2010	78
Tabel 4.3. Jumlah Surat Paksa Yang Dikeluarkan Oleh KPP Madya Palembang Tahun 2007-2010	79
Tabel 4.4. Jumlah Surat Sita Yang Dikeluarkan Oleh KPP Madya Palembang Tahun 2007-2010	80
Tabel 4.5. Rekapitulasi Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Di KPP Madya Palembang Tahun 2007 Sampai Dengan Tahun 2010	81
Tabel 4.6. Persentase Perkembangan Penyampaian SPT Tahunan Badan Di KPP Madya Palembang.....	83
Tabel 4.7. Rincian Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Yang Lengkap, Jelas Dan Benar Yang Diterima Dibandingkan Dengan Jumlah Wajib Pajak Badan Efektif KPP Madya Palembang	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.3. Struktur Organisasi KPP Madya Palembang	61
--	-----------

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PPH BADAN DI KPP MADYA PALEMBANG

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan KPP Madya Palembang dalam meningkatkan penerimaan PPh Badan. Skripsi ini meneliti apa yang dilakukan KPP Madya Palembang untuk meningkatkan penerimaan PPh Badan dengan melihat pengaruh penerbitan surat paksa, surat sita, kepatuhan penyampaian SPT tahunan, sosialisasi SPT dan pemeriksaan pajak dari tahun 2007 sampai dengan 2010 terhadap jumlah penerimaan PPh Badan. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Data diperoleh dari KPP Madya Palembang. Data dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu yang berkaitan dengan penerbitan surat paksa, surat sita, kepatuhan penyampaian SPT tahunan, sosialisasi SPT dan pemeriksaan pajak dari tahun 2007 sampai dengan 2010.

Hasil penelitian menunjukkan selama tahun 2007-2010 pengaruh penyampaian SPT tahunan terhadap jumlah penerimaan PPh badan tidak terlalu berpengaruh karena jumlah PPh Badan tergantung dari jumlah omset dari suatu badan tersebut, kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan penerimaan PPh badan cukup efektif dan terlaksana dengan baik jumlah penerbitan surat teguran, surat paksa dan surat sita dinilai cukup efektif dengan pembayaran tunggakan pajaknya.

Kata kunci: Pajak, Surat Paksa, Surat Sita, SPT, PPh Badan

EFFORTS ARE MADE TO INCREASE IN REVENUE BOARD PPH KPP MADYA PALEMBANG

Abstract

This study aims to determine the efforts made in improving the KPP Madya Palembang Tax receipts. This thesis examines what the KPP Madya Palembang Corporate Tax revenue to increase by looking at the effect of the issuance of forced labor, confiscation letters, compliance with the annual submission of SPT, SPT socialization and examination of tax years 2007 through 2010 of total revenue in corporate tax. The type of data used secondary data. Data obtained from the KPP Madya Palembang. Data were analyzed with descriptive analysis method that is related to issuance of letters of force, seized the letter, the annual compliance delivery SPT, SPT and the socialization of the tax from 2007 until 2010.

The results showed the influenced during the years 2007 until 2010 the annual tax return submission to the amount of income tax revenue loss is not very influential because of the number of corporate tax depending on the amount of turnover of an entity, the activities performed in an increase in income tax revenue loss is quite effective and accomplished with a good amount of issuance reprimand, letters and letter forcible confiscation was considered quite with the payment of tax arrears.

Keywords : Taxation, Forced Labor Letter, Letter of sita, SPT, Corporate Tax

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dinamis dan proporsional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab. Sebagai negara yang berkembang Negara Republik Indonesia tengah menggalakkan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan hukum. Bidang-bidang tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Untuk memberikan arah dalam usaha mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang pada dasarnya merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya. Salah satu tahap program pembangunan tersebut

alah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 yang merupakan visi dan misi Kabinet Indonesia Bersatu. RPJMN tersebut menetapkan tiga agenda penting, yaitu: (i) Menciptakan Indonesia yang aman dan damai; (ii) Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; (iii) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian ketiga tujuan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahunan yang direncanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

RAPBN merupakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disusun pemerintah dan merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah yang berfungsi sebagai alat untuk menjaga tujuan bernegara dan stabilitas dalam negeri Indonesia. RAPBN menunjukkan berbagai kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dan pengaruhnya terhadap alokasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Pendapatan negara merupakan suatu hal yang sangat penting guna membiayai pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. Pendapatan negara mempunyai berbagai macam sumber, baik dari sektor migas maupun nonmigas. Penerimaan dari sektor migas sangat besar, tetapi sektor migas tidak dapat kita andalkan sebagai sumber utama penerimaan negara terus-menerus karena persediaan sumber daya migas dari waktu ke waktu semakin menipis. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan dari sektor nonmigas. Salah satunya adalah melalui sektor pajak. Sektor pajak dapat dikatakan sebagai sumber penerimaan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Hal ini disebabkan selain karena jumlahnya yang relatif stabil, juga mencerminkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pada RAPBN 2009 pemerintah memproyeksikan penerimaan negara yang berasal dari 3 sektor, yaitu: sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan dari sektor hibah. Dengan alokasi sebagai berikut, yaitu jika dilihat pada *Indonesian Crude Price (ICP)* 130 maka, penerimaan dari sektor perpajakan sebesar 748,9 trilyun atau 66,63%, penerimaan negara dari bukan pajak sebesar 374,1 trilyun atau 33,29%, dan penerimaan dari hibah sebesar 0,9 trilyun atau 0,08%. Dilihat Pada *Indonesian Crude Price (ICP)* 100 maka, penerimaan dari sektor perpajakan sebesar 726,3 trilyun atau 71,05%, penerimaan negara dari bukan pajak sebesar 295,4 trilyun atau 28,89 %, dan penerimaan dari hibah sebesar 0,9 trilyun atau 0,06%.

Rasio penerimaan perpajakan meningkat dari 13,6% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dalam APBN 2008 menjadi 13,7% dari PDB RAPBN 2009 yang dipengaruhi oleh peningkatan rasio penerimaan perpajakan non migas dari sebesar 12,4% terhadap PDB dalam APBN 2008 menjadi 12,5% terhadap PDB dalam RAPBN 2009. (www.ekon.go.id, siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 15 Agustus 2008, Jakarta)

Dari data tersebut, sektor pajak memiliki nilai strategis dalam pendanaan pembangunan sehingga pemerintah memberikan perhatian yang besar pada pembenahan sektor ini. Sesuai dengan amanat Undang-undang Perpajakan Nasional, yang akan meningkatkan peran pajak sebagai sumber pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan.

Sejak tahun 1984, pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal itu dimulai dengan reformasi pajak (*tax reform*) terhadap Undang-Undang pajak sampai dengan berbagai jenis insentif pajak lainnya. Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan.

Reformasi pajak ini ditandai dengan dikeluarkannya beberapa Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), dan Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Perubahan yang mendasar atas Undang-Undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, yaitu dari sistem *Official Assessment System* yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, menjadi sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yang menuntut Wajib Pajak menjadi proaktif. *Self Assessment System* menempatkan Wajib Pajak sebagai subyek yang menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP). Pada sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem ini menuntut masyarakat untuk mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi agar *Self Assessment System* dapat berjalan dengan baik. Ciri yang dimiliki sistem ini adalah adanya kepastian hukum, perhitungan yang sederhana, pelaksanaan yang mudah, lebih adil dan merata, perhitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Perubahan sistem ini dilakukan untuk mengurangi kolusi. Selain itu, pemerintah bermaksud meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

Setelah reformasi pajak tahun 1983, diadakan lagi reformasi tahun 1994 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang No. 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang No. 11 tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dan

Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tahun 2000 dilakukan lagi reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang No. 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Tanah atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah melalui modernisasi administrasi perpajakan secara menyeluruh meliputi subyek modernisasi. Upaya ini pada tahun 2006 diresmikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati . Pada tahap awal dilakukan modernisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah (Kanwil). Melihat kantor operasional (KPP dan Kanwil) yang modern telah memenuhi tuntutan pelayanan yang baik dalam kerangka *good governance* dan pelayanan prima, maka kantor pusat juga dimodernisasi. Paradigma organisasi seluruhnya diubah menjadi berdasarkan fungsi, yakni: pelayanan, pemeriksaan, penagihan, penyidikan dan lainnya. Sehingga tidak ada lagi direktorat atau bidang atau seksi yang khusus menangani jenis Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pelaksanaannya yang dilaksanakan pada awal 2007 untuk mendayung dan menggerakkan biduk organisasi merupakan sumber kekuatan untuk mengawali berjalannya proses modernisasi secara menyeluruh.

Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak ini yaitu dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Upaya ekstensifikasi Wajib Pajak dilakukan dengan meningkatkan jumlah subyek pajak melalui kegiatan mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subyek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak tetapi belum terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan tentunya belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau disingkat NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Disamping melalui KPP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *e-register*, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik online (internet).

Sedangkan kegiatan intensifikasi adalah sebagai kegiatan pengungkapan laporan Wajib Pajak yang tidak benar. Upaya lain yang dilakukan adalah *canvassing*, program *knowing your tax payer*, dan penegakan hukum. Upaya lanjutan adalah kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Sarana yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan atau disingkat SPT. SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau sebagai sarana untuk Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut KUP. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak, (Yadi, 2009).

Kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi ini akan memicu pertumbuhan penerimaan dari segi pajak dan akan lebih baik lagi bila dilakukan bersama-sama. Usaha intensifikasi pajak lebih ditujukan terhadap usaha menambah penerimaan negara dengan menggali lebih dalam potensi pajak yang sudah ada. Salah satu

perwujudan usaha intensifikasi ini adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang selama ini tidak atau kurang memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan, kegiatan ekstensifikasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk menambah jumlah wajib pajak. Kegiatan Ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

Latar belakang dilakukan ekstensifikasi, dengan melihat perbandingan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta orang, dibandingkan jumlah WP yang masih rendah, belum mencapai 10% dari jumlah kepala keluarga. Jumlah wajib pajak yang sedikit inilah menarik pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk melakukan program ekstensifikasi guna mengoptimalkan jumlah wajib pajak di Indonesia.

Propinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk yang bekerja meningkat dari tahun ke tahunnya, memiliki andil dalam meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta berkembangnya perekonomian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penerimaan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PPh badan pada KPP Madya Palembang. Penulis mengangkat permasalahan tersebut ke dalam tulisan dengan judul, **“Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan PPh Badan Pada KPP Madya Palembang”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti :

1. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan PPh

badan pada KPP Madya Palembang?

2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan penerimaan PPh badan pada KPP Madya Palembang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Palembang dalam meningkatkan penerimaan PPh badan di KPP Madya Palembang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan peningkatan penerimaan PPh badan di KPP Madya Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan, antara lain:

- Bagi Penulis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pribadi mahasiswa dan juga bermanfaat sebagai kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang telah didapatkan selama berada di perguruan tinggi ke dalam praktek dunia kerja yang nyata.
- Bagi Kantor Pajak: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kantor pajak mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Palembang dalam meningkatkan jumlah penerimaan PPh Badan.
- Bagi Akademisi: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Palembang dalam meningkatkan jumlah penerimaan PPh Badan.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Penelitian hanya dilakukan di satu Kantor Pelayanan Pajak yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.
2. Objek dari penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PPh badan di KPP Madya Palembang
3. Data yang akan diteliti hanya pada periode waktu 4 tahun yaitu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

1.5.2. Data dan Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Dalam usaha untuk mencapai data yang akurat dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan data pendukung yang sesuai dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Sumber data yang digunakan adalah

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari KPP Madya Palembang atau langsung dari sumbernya yang belum diolah. Misalnya jumlah realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan selama 4 (empat) tahun (2007–2010) serta data mengenai gambaran umum KPP Madya Palembang.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga Penulis dapat langsung

menggunakannya, misalnya: berupa data-data berkaitan dengan Wajib Pajak, seperti jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar.

2. Jenis data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Kualitatif, adalah data yang berisikan mengenai kondisi Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, misalnya informasi tentang gambaran umum KPP Madya Palembang, program peningkatan penerimaan pph badan di KPP Madya Palembang.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka jumlah Wajib Pajak badan KPP Madya Palembang, jumlah penerimaan PPh badan di KPP Madya Palembang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Pustaka

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka, yang menggunakan buku-buku referensi, yang dapat digunakan sebagai acuan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diambil dan untuk mempermudah pemahaman atas permasalahan melalui landasan teori yang digunakan.

b. Pengamatan Langsung

Metode ini dilakukan dengan pengambilan data di lapangan untuk memperoleh keterangan atau data yang dikehendaki. Cara pengumpulan data:

1). Teknik Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung kepada beberapa orang karyawan yang mewakili

instansi untuk mendapatkan keterangan atau data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2). Teknik Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan mencatat, menyalin atau mengkopi dokumen-dokumen yang sudah ada pada KPP Madya Palembang. pengumpulan data melalui internet, media cetak, majalah-majalah yang berhubungan dengan permasalahan.

1.5.3. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif, yaitu:

1. Teknik Analisa Deskriptif Kualitatif

Yaitu menggunakan catatan dan dokumen yang berbentuk uraian dan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik yang telah didokumentasikan oleh Pihak KPP Madya Palembang maupun yang penulis peroleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait.

3. Teknik Analisa Deskriptif Kuantitatif

Yaitu teknis analisis yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka, dan menganalisa data yang diambil berdasarkan sampel sehingga dapat dihitung untuk mendapatkan hasil.

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, data dan metode pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi konsep dasar perpajakan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, teori dan kebijakan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Badan.

BAB III : GAMBARAN UMUM KPP MADYA PALEMBANG

Bab ketiga ini membahas tentang gambaran umum KPP Madya Palembang, yang meliputi sejarah singkat berdirinya KPP, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab, visi dan misi KPP, serta data dan fakta yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam skripsi ini.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang analisis data dan fakta yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, analisis dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif berdasarkan teori-teori yang telah ada. Serta dicari alternatif pemecahan masalah yang mungkin diterapkan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi beberapa kesimpulan hasil analisis penulis serta saran yang diberikan kepada KPP Madya Palembang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu*. Edisi Kesembilanbelas. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi Pertama*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi FE UNSRI. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Unsri*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 16, Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36, Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17, Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*, Lembaga Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Yadi, Asral. 2009. *Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Terhadap Jumlah Penerimaan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*. Skripsi. Universitas Sriwijaya. Palembang.